

## Partisipasi *Stakeholders* dalam Capaian Program Desa Mandiri Pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman

Agus Krisnadi<sup>1</sup>

Diterima : 06 Juli 2012

Disetujui : 06 Agustus 2012

### ABSTRACT

*Program Desa Mandiri Pangan –Demapan (Food Self-Sufficient Village program) is one the government's initiatives aimed to build self sufficiency of food in a region. However, the importance of participation in development processes in the villages has not been fully understood and carried out by the stakeholders, be it the government, the private sector, the NGOs or the community. This program has been carried out in Sleman Regency since 2009 comprising four stages, whereas year 2012 is planned as the self-sufficiency year. The study examines several variables including (1) level of participation, (2) methods/techniques of participation, (3) intensity of participation and (4) barriers/constraints of participation. Analysis showed that the key stakeholders in the implementation of the program included (1) Tim Pangan Desa (Village Food Team), Lembaga Keuangan Desa (Village Finance Institution), Kelompok Afinitas (Affinity Group), Pengurus Lumbung Pangan (Food Stock Committee) and the private sector. However, the role of the private sector is considered to be lacking. Low level of participation from the village administration is found to have reduced the level of trust, resulting in poor communication. Musyawarah (discussions), dialogues and negotiations should be carried out by the village administration to improve communication among stakeholders to ensure the replicability of the program in the surrounding villages and areas sustainably.*

**Key words :** Food Sufficient Village , Stakeholders, Participation

### ABSTRAK

*Program Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan menciptakan kemandirian pangan pada suatu wilayah. Akan tetapi pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan di desa ternyata belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh para stakeholders, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, maupun masyarakat. Program ini telah dilaksanakan di Kabupaten Sleman sejak tahun 2009 dalam empat tahap, dimana pada tahun 2012 direncanakan sebagai tahun kemandirian. Studi ini mengamati variabel-variabel termasuk: (1) tingkat partisipasi, (2) metode/teknik partisipasi, (3) intensitas partisipasi dan (4) hambatan/kendala partisipasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa stakeholders kunci dalam pelaksanaan program ini mencakup Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa, Kelompok Afinitas, Pengurus Lumbung Pangan, dan pihak Swasta. Akan tetapi keterlibatan pihak swasta dirasakan masih kurang. Intensitas partisipasi yang rendah dari pemerintah desa ternyata mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan sehingga komunikasi belum optimal. Musyawarah, dialog, dan negosiasi merupakan usaha-usaha yang harus dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan komunikasi antar stakeholders sehingga program DEMAPAN tersebut berpotensi untuk direplikasi di desa dan wilayah di sekitarnya secara berkelanjutan.*

**Kata kunci :** Desa Mandiri Pangan, Stakeholders, Partisipasi

<sup>1</sup> Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, Yogyakarta  
Kontak Penulis :

## PENDAHULUAN

Desa Wukirharjo merupakan salah satu wilayah Kabupaten Sleman yang mempunyai tipologi wilayah pegunungan. Pekerjaan utama penduduk di desa ini sebagian besar adalah petani. Akan tetapi lahan yang di pergunakan sebagian besar adalah tanah kering/tegal/ladang yang hanya mengandalkan air dari hujan. Komoditas pertanian yang banyak dihasilkan yaitu jagung, ubi kayu, bayam, dan padi. Pada saat musim kemarau penduduk desa pada umumnya mencari pekerjaan pengganti sebagai sumber penghasilan. Pendapatan dari hasil bertani tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga mereka. Keadaan tanah yang kering menuntut usaha tani dengan komoditas yang sesuai. Sedangkan komoditas yang sesuai pada umumnya memiliki nilai jual rendah apabila di jual tanpa pengolahan lebih lanjut, contohnya komoditas jagung dan ubi kayu.

Melihat kondisi masyarakat yang masih banyak yang belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan analisis dan fakta yang ada melalui kebijakan pengembangan Desa Mandiri Pangan diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan. Pemberian bantuan modal sebesar Rp. 100.000.000,- pada tahun 2009 diharapkan sebagai upaya peningkatan usaha masyarakat desa sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok yang mereka ajukan. Pada tahun 2010 modal di tambah sebesar Rp. 40.000.000,- dan Rp. 20.000.000,- untuk modal pengisian cadangan pangan di lumbung kelompok dan pada tahun 2011 modal ditambah lagi sebesar Rp. 20.000.000,-

Masyarakat yang berhak menerima bantuan modal adalah anggota kelompok afinitas yang telah dibentuk. Kelompok afinitas merupakan kelompok sasaran penerima bantuan modal yang tergolong keluarga miskin. Dalam upaya pemerataan dan pembelajaran masyarakat tentang bantuan pemerintah, maka mekanisme bantuan dilakukan dengan bergulir. Penerima bantuan yang bisa disebut juga peminjam modal, akan mengembalikan pinjaman ke Lembaga Keuangan Desa. Lembaga Keuangan Desa merupakan suatu lembaga keuangan yang bertugas menerima pengembalian dan menyalurkan modal sesuai dengan kesepakatan desa. Dengan demikian diharapkan modal dapat di akses oleh semua warga miskin dalam kelompok afinitas dan meningkatkan usaha dalam upaya peningkatan pendapatan. Selain itu, pemberian bantuan pengisian cadangan pangan diharapkan mampu diwujudkan sebagai alternatif cadangan pangan apabila desa mengalami kekurangan pangan. Permasalahan timbul dengan kondisi fisik desa yang minim akan hasil produksi pangan berupa padi. Sehingga cadangan pangan yang ada haruslah mencari hasil produksi dari luar desa untuk komoditas padi, akan tetapi untuk komoditas jagung dan ubi kayu pada umumnya setiap warga memiliki meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan termasuk pada kategori sedang yaitu dari aspek pemberdayaan masyarakat dan aspek pemantapan ketahanan pangan. Hal ini berbeda halnya dengan pengembangan Desa Mandiri Pangan pada tahapan yang sama di Desa Sumberejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori tinggi dari aspek pemberdayaan masyarakat, pemantapan ketahanan pangan, serta aspek sarana prasarana (BKPP, 2011).

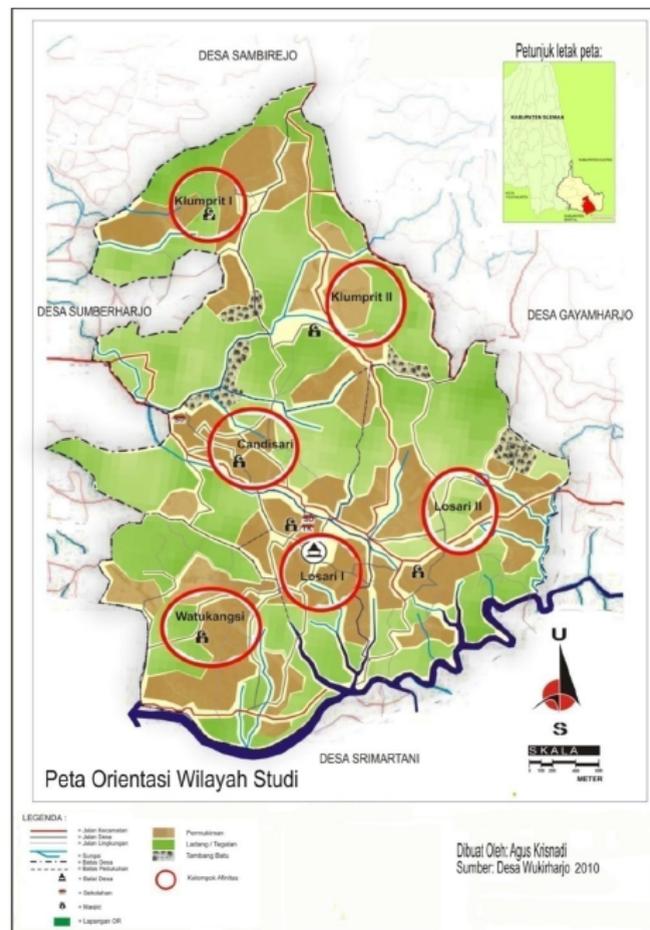
Berdasarkan uraian di atas, perlu dikaji lebih lanjut partisipasi *stakeholders* dalam capaian program Desa Mandiri Pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh partisipasi *stakeholders* dalam capaian Desa Mandiri Pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa teknik tergantung pada karakteristik kebutuhan masing-masing data. Akan tetapi data yang dibutuhkan dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Pemilihan responden dilakukan dengan metode sampel secara non-probabilitas (pemilihan nonrandom) yaitu dengan *Judgment Sampling*. Menurut Jogiyanto (2008), *judgment sampling* merupakan *purposive sampling* dengan suatu pertimbangan tertentu dalam penentuan sampel. Sedangkan dalam penentuan jumlah sampel tersebut akan dihitung dengan rumus Slovin.

## RUANG LINGKUP WILAYAH STUDI

Ruang lingkup wilayah dalam studi ini adalah Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Desa ini memiliki 12 (dua belas) RW di 6 (enam) dusun yaitu dusun Candisari, Watukangsi, Losari I, Losari II, Klumprit I, dan Klumprit II, dengan luas desa sekitar 460,6085 Ha. Deliniasi wilayah studi ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Sumber: Desa Wukirharjo, 2010

**GAMBAR 1**  
**PETA LOKASI SEBAGAI WILAYAH STUDI MIKRO**

## STAKEHOLDERS KETAHANAN PANGAN

*Stakeholders* merupakan individu, sekelompok individu baik perempuan dan atau laki-laki yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi oleh suatu program pembangun (Sumarto, 2003:18). Sedangkan Gray *et al* (2001) berpendapat *stakeholders* merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu usaha dan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan usaha. Berbeda dengan Friedman (1984) yang berpendapat bahwa *stakeholders* merupakan sebuah kelompok atau individu yang berpengaruh dan mempengaruhi dalam sebuah kerjasama untuk mencapai kesuksesan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

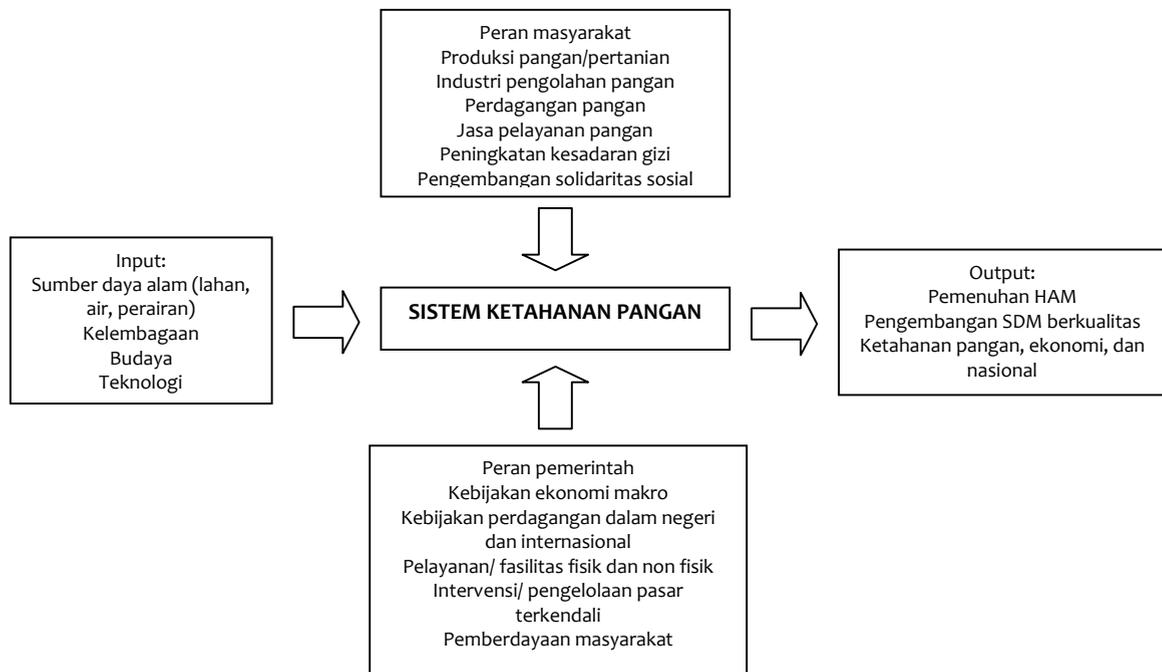
Keberlanjutan suatu usaha, tidak terpisahkan dari peran *stakeholders* atau bisa dikatakan bahwa suatu usaha sangat tergantung pada dukungan *stakeholders* (Gray *et al* dalam Ghozali dan Chariri (2007). Menurut Kasali dalam Wibisono (2007) *stakeholders* terbagi menjadi 5 jenis yaitu berdasarkan lingkungannya, skala prioritas, hubungan dengan organisasi, keberpihakan, dan aktivitasnya. Terdapat beberapa jenis *stakeholders* sebagai berikut:

1. *Stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal  
Berdasarkan lingkungannya *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan suatu usaha atau organisasi disebut *stakeholders* internal, contohnya ketua kelompok tani, anggota kelompok tani. Sedangkan *stakeholders* yang berada di luar lingkungan usaha atau organisasi disebut *stakeholders* eksternal misalnya pedagang bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian.
2. *Stakeholders* primer, sekunder, dan marjinal  
Berdasarkan skala prioritas, maka *stakeholders* dapat dibagi menjadi *stakeholders* primer yaitu *stakeholders* yang paling diutamakan dan penting untuk didahulukan. Sedangkan *stakeholders* yang kurang penting disebut *stakeholders* sekunder dan *stakeholders* yang biasa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal.
3. *Stakeholders* tradisioal dan *stakeholders* masa depan  
Berdasarkan hubungan dengan organisasi usaha, maka terdapat 2 bentuk *stakeholders* tradisional yang merupakan bagian dari organisasi usaha atau sudah berhubungan dengan organisasi usaha tersebut dan *stakeholder* masa depan yang merupakan perkiraan masa yang akan datang memberikan pengaruh potensial pada suatu organisasi usaha tersebut.
4. *Proponents*, *apponents*, dan *uncommitted*  
Tentunya dalam suatu organisasi usaha ada *stakeholders* yang mendukung organisasi atau disebut *proponents*, ada *stakeholders* yang menentang organisasi atau disebut *apponents*, dan juga *stakeholders* yang tidak peduli atau mengabaikan disebut *uncommitted*.
5. *Silent majority* dan *vocal minority*  
Dalam upaya *stakeholders* melakukan dukungan maupun yang sifatnya menentang, maka bentuk dukungan maupun tentangan tersebut dapat dilakukan secara vokal atau aktif, akan tetapi juga ada yang secara *silent* atau pasif.

Peran *stakeholder* dalam pengembangan masyarakat sangatlah mendukung keberhasilan suatu program-program pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Budiati (2005) bahwa peran partisipasi *stakeholder* pada penerapan *co-management* secara signifikan dapat digunakan sebagai indikator kesuksesan *co-managent* di daerah Alian Sungai Babon Jawa Tengah. Dialog antar *stakeholders* juga dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat pada awal tahun 2000. Pada awalnya kegiatan tersebut banyak mengalami hambatan, hal ini banyak yang berpendapat bahwa kegiatan tersebut membutuhkan banyak biaya dan sekedar formalitas. Akan tetapi setelah dilaksanakan menghasilkan rumusan yang diakomodasikan dalam dokumen perencanaan seperti Propeda,

Renstra, Rapetada (Widiani dalam sumarto, 2004:373). Lebih lanjut Sumarto menambahkan agar pelaksanaan dialog antar *stakeholders* dan ruang partisipasi lebih berkualitas maka diperlukan mekanisme yang jelas.

Dalam mewujudkan pembangunan Ketahanan Pangan yang berkelanjutan terdapat perubahan paradigma dalam pencapaiannya. Paradigma baru tersebut menurut Fatah (2006:426) melibatkan beberapa unsur *stakeholders* yang berkaitan dengan peran pemerintah, peran masyarakat dan adanya input. Peran pemerintah sebagai fasilitator meliputi berbagai kebijakan ekonomi, kebijakan perdagangan, pelayanan/fasilitas fisik dan non fisik, intervensi/pengelolaan pasar terkendali, dan pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan produksi pangan/pertanian, industri pengolahan pangan, peningkatan gizi dan pengembangan solidaritas sosial. Sebagai input berupa sumber daya alam, kelembagaan, budaya, dan teknologi. Ketiga unsur tersebut saling terkait guna mendapatkan output yang diharapkan yaitu terpenuhinya hak asasi manusia yang paling hakiki dalam pemenuhan kebutuhan pangan, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketahanan pangan. Sehingga dapat dijelaskan dalam kerangka sistem ketahanan pangan:



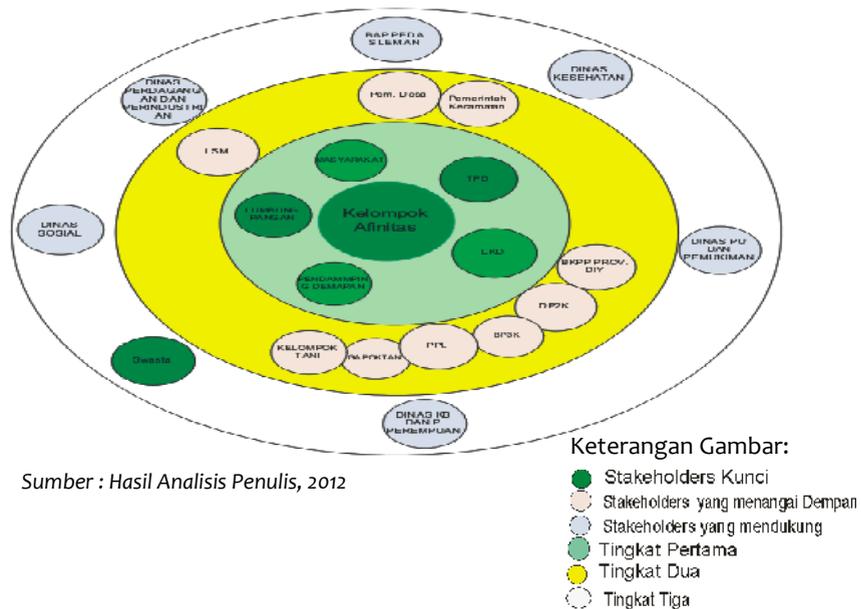
Sumber : Fatah, 2006

**GAMBAR 2**  
**KERANGKA SISTEM KETAHANAN PANGAN**

## **ANALISA PARTISIPASI STAKEHOLDERS DALAM CAPAIAN PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA WUKIRHARJO KECAMATAN PRAMBANAN**

Analisis ini dilakukan dengan melakukan identifikasi *stakeholders* kemudian dilakukan identifikasi pola interaksi dan hubungan antar *stakeholders* dan dilakukan penyusunan ranking *stakeholders* dengan melalui skoring. Tujuan dari analisis ini adalah menentukan secara tepat pihak yang terlibat secara langsung dalam program desa mandiri pangan, sehingga ada jaminan bahwa berbagai kegiatan dalam program desa mandiri pangan yang

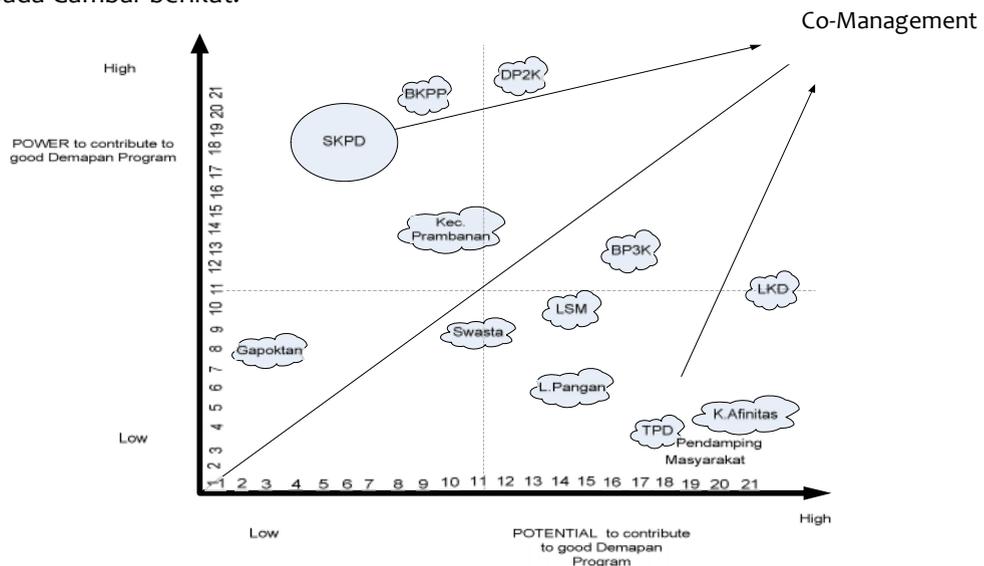
disusun dalam dokumen perencanaan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Dengan adanya legitimasi tersebut, maka program desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan akan lebih *sustain*. Berdasarkan temuan penulis, maka gambar tingkatan stakeholder pada program desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2012

**GAMBAR 3**  
**TINGKATAN STAKEHOLDERS DESA MANDIRI PANGAN DI DESA WUKIRHARJO**

Berdasarkan susunan peringkat *stakeholders* tersebut maka apabila disusun dalam sebuah kuadran *stakeholders*, maka sebagai gambaran akan terlihat pada posisi *stakeholders grup* seperti pada Gambar berikut:



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2012

**GAMBAR 4**  
**KUADRAN STAKEHOLDERS DESA MANDIRI PANGAN**

Berdasarkan Gambar 4, maka pengembangan desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan *co-management* antara *stakeholders potential* dan *stakeholders power*. *Collaborative management (co-management)* merupakan pendekatan yang berbasis pada upaya peningkatan hasil suatu program dengan meningkatkan dukungan dari penggabungan kelebihan masing-masing *stakeholders* dengan harapan mampu mengurangi kelemahan dari masing-masing *stakeholders*. Hal ini sependapat dengan Budiati (2012), pendekatan *co-management* dilakukan dalam berbagai proses suatu program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Bentuk ini mengedepankan kepemimpinan yang partisipatif dalam pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan program. Sejalan dengan Pomeroy dan Williams dalam budiati (2012), adanya *co-management* merupakan pembagian resiko dan manfaat yang jelas antara *stakeholders* sehingga terwujud program yang berkelanjutan.

### **Analisis Partisipasi**

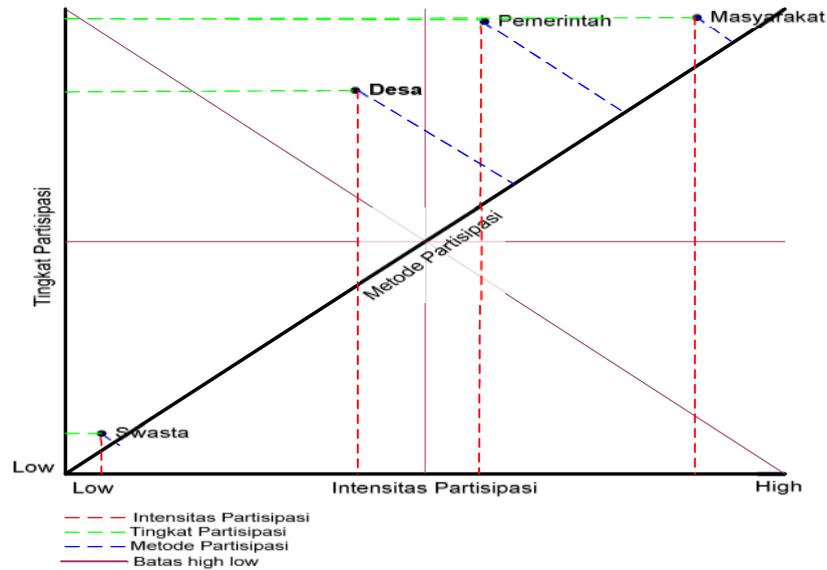
Metode yang digunakan untuk analisis partisipasi ini adalah analisis deskriptif dan regresi corelasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan partisipasi *stakeholders* berdasarkan persepsi masyarakat setelah melalui justifikasi peneliti, sedangkan regresi corelasi digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi jenis, intensitas, metode, serta hambatan partisipasi terhadap capaian program desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo. Adapun skor partisipasi *stakeholders* pada capaian desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo adalah sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**SKOR AGREGAT PARTISIPASI DESA MANDIRI PANGAN**  
**DI DESA WUKIRHARJO KECAMATAN PRAMBANAN**

No	Stakeholder	Tingkat Partisipasi	Kategori	Intensitas Partisipasi	Kategori	Metode Partisipasi	Kategori	Total Partisipasi	Kategori
1	Masyarakat	14	Tinggi	13	Tinggi	18	Tinggi	45	Tinggi
2	Pemerintah	14	Tinggi	10	Tinggi	17	Tinggi	41	Tinggi
3	Desa	13	Tinggi	9	Rendah	13	Tinggi	35	Tinggi
4	Swasta	5	Rendah	6	Rendah	6	Rendah	17	Rendah

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2012

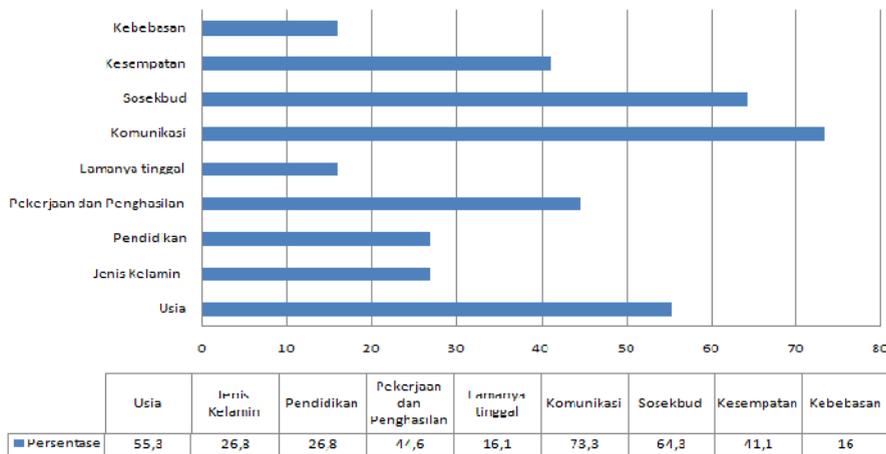
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan partisipasi pemerintah, desa, dan masyarakat termasuk tinggi, tetapi partisipasi pihak swasta termasuk dalam kategori rendah. Keterlibatan pihak swasta dalam hal program desa mandiri pangan dirasakan masyarakat masih sangat kurang. Pihak pemerintah belum secara nyata melibatkan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan produktif pada program desa mandiri pangan, sehingga muncul permasalahan pemasaran hasil produksi yang belum maksimal. Pada saat produksi melimpah karena adanya bahan baku yang cukup, permasalahan timbul dalam hal pemasarannya. Sedangkan pada saat bahan baku lokal sangat berkurang maka produksi tidak ada alternatif produk atau usaha memasukan bahan baku dari luar wilayah. Adapun kuadaran agregat partisipasi *stakeholders* pada capaian desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo adalah sebagai berikut:



**GAMBAR 5**  
**KUADRAT AGREGAT PARTISIPASI STAKEHOLDERS**

Intensitas partisipasi pemerintah desa berdasarkan Gambar 5 masih tergolong rendah. Rendahnya ini dikarenakan kurangnya pembinaan, bimbingan, dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok afinitas. Akibat dari rendahnya intensitas tersebut, tingkat kepercayaan kelompok menjadi menurun sehingga komunikasi menjadi tidak *aksesible* sebagaimana terlihat pada hubungan *stakeholders* pada analisis *stakeholders*. Masih ada kelompok afinitas yang belum percaya penuh pada lembaga yang berada di Pemerintah Desa salah satunya adalah Tim Pangan Desa dan Lembaga Keuangan Desa yang di dominasi oleh orang-orang Pemerintah Desa. Hal ini berdampak pada ketidaksepakatan sistem pengembalian uang yang seharusnya dikembalikan ke Lembaga Keuangan Desa akan tetapi mereka meminta untuk dapat mengelola sendiri.

**Hambatan Partisipasi**



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2012

**GAMBAR 6**  
**PERSENTASE PERSEPSI HAMBATAN STAKEHOLDERS**

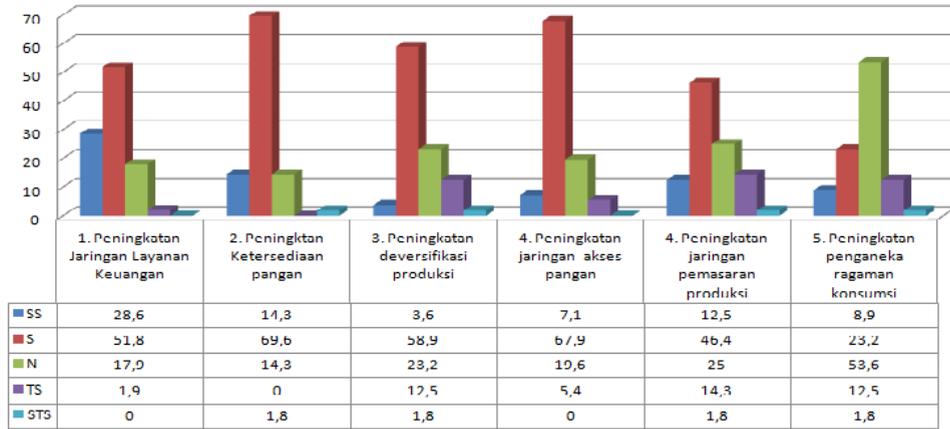
Berdasarkan Gambar 6 tersebut, hambatan utama partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan adalah kurangnya kemampuan komunikasi masyarakat serta adanya perbedaan sosial dan ekonomi. Disamping itu komunikasi antar *stakeholders* dalam program desa mandiri pangan kurang berjalan secara harmonis. Hal ini disebabkan adanya kurang keterbukaan sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Budiati (2012), bahwa pendekatan partisipatif akan lebih efektif apabila terjalin kesetaraan, kepercayaan, dan pembagian resiko yang sama. Apabila salah satu dari ketiga prinsip tersebut ada yang kurang maka akan mengurangi intensitas komunikasi antar *stakeholders*. Lemahnya komunikasi menjadikan hambatan dalam proses partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan. Intensitas partisipasi pihak pemerintah desa yang masih kurang mengakibatkan konflik sosial, sehingga komunikasi menjadi lemah karena menurunnya tingkat kepercayaan.

Sependapat dengan Hamijoyo (2005) bahwa konflik sosial dapat mengakibatkan kemacetan komunikasi *stakeholders* dalam program pembangunan. Tetapi kemacetan komunikasi tersebut masih ada kemungkinan untuk pengertian, akomodasi, peningkatan kesepakatan ulang, maupun perdamaian. Komunikasi sebenarnya bukan penyebaran tak berimbang dari pendapat atau kemauan dari yang kuat pada yang lemah akan tetapi lebih cenderung pada pencarian titik temu. Peningkatan intensitas partisipasi mampu meningkatkan komunikasi antar *stakeholders*. Bentuk nyata adalah dengan musyawarah, dialog, dan negosiasi sehingga tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dalam menyamakan berbagai kepentingan *stakeholders* untuk menghindari konflik terjadi.

Kurangnya komunikasi juga akan berdampak pada keberlanjutan program, sehingga perlu dilakukan peningkatan komunikasi. Komunikasi yang intensif mampu meningkatkan kemungkinan pertukaran gagasan (*sharing idea*), jalin kepentingan (*knitting interst*), dan pemaduan karya (*synergy of action*) diantara *stakeholders* (Niern Chaipan & Thalister, 1994; Chechoway, 1995; Miltin & Thompson, 1999). Tingkat partisipasi yang tinggi akan tetapi tidak didukung adanya intensitas partisipasi yang tinggi, maka akan ada kecenderungan agregat partisipasi akan semakin menurun.

### **Capaian Desa Mandiri Pangan**

Ketahanan pangan didukung adanya tiga pilar utama yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Program desa mandiri pangan dalam mencapai tujuan utama program tidak lepas dari tiga pilar pokok tersebut. Capaian desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan dilakukan dengan analisis metode kuantitatif dengan melakukan skoring. Aspek ketersediaan pangan dilakukan skoring persepsi masyarakat terhadap peningkatan ketersediaan pangan selama program dilaksanakan. Aspek distribusi pangan dilakukan dengan skoring persepsi masyarakat terhadap peningkatan jaringan layanan keuangan, peningkatan akses pangan, dan peningkatan jaringan pemasaran produksi. Sedangkan pada aspek konsumsi pangan dilakukan dengan skoring persepsi masyarakat pada peningkatan diversifikasi produksi pangan dan peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan. Adapun hasil skoring capaian desa mandiri pangan adalah sebagai berikut:



Sumber : Hasil analisis Penulis, 2012

GAMBAR 7

TOTAL SKOR CAPAIAN DESA MANDIRI PANGAN DI DESA WUKIRHARJO KECAMATAN PRAMBANAN

Analisis Hubungan Partisipasi dengan Capaian Desa Mandiri Pangan

TABEL 2  
HASIL ANALISIS CORRELATIONS


Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2012

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa ada hubungan antara jenis partisipasi dengan capaian program desa mandiri pangan dengan  $p = 0,002 < 0,05$ . Intensitas partisipasi juga ada hubungan dengan capaian program desa mandiri pangan dengan  $p = 0,000 < 0,05$ . Begitu pula dengan metode/teknik partisipasi juga mempunyai hubungan dengan program desa mandiri pangan dengan  $p = 0,000 < 0,05$ . Tetapi hambatan/kendala partisipasi ternyata tidak ada hubungannya dengan capaian program desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka simpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Program desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan terdapat beberapa stakeholder kunci yaitu Kelompok Afinitas, Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa, dan Pengurus Lumbung Pangan.
2. Komunikasi, koordinasi, dan konsultasi *stakeholders* belum optimal antara Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa, Pengurus Lumbung Pangan, dan Kelompok Afinitas.
3. Program desa mandiri pangan yang dilaksanakan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan, tingkat partisipasinya adalah pada tahapan *komunikasi* dengan menyertakan seluruh *stakeholders* dalam setiap pengambilan keputusan program hanya untuk mengembangkan kesepakatan bersama.
4. Secara umum intesitas partisipasi pada program desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan termasuk tinggi, tetapi apabila dilihat dari *stakeholders* maka intensitas tertinggi pada masyarakat itu sendiri kemudian didukung dengan pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, tetapi rendah intesitas partisipasi dari pihak swasta dan pemerintah desa.
5. Hambatan partisipasi pada program desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan adalah masih kurangnya komunikasi kegiatan antar *stakeholders*. Di pihak masyarakat komunikasi terhambat karena kurangnya kapasitas dalam komunikasi, sedangkan pemerintah sebagai penanggungjawab belum mampu memberikan informasi yang jelas tentang program dari awal program.
6. Agregat partisipasi yang terdiri dari tingkat, intensitas, dan metode partisipasi ada hubungan dengan capaian program desa mandiri pangan, tetapi pada hambatan partisipasi tidak ada hubungan dengan capaian program desa mandiri pangan di Desa Wukirharjo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi DI Yogyakarta. 2011. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Sumber Dana APBD.
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi DI Yogyakarta. 2011. Laporan Evaluasi Desa Mandiri Pangan Tahapan Tahun 2011. Yogyakarta.
- Budiati, Lilin. 2006. "Penerapan Co-Management untuk Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Studi Kasus: Daerah Aliran Sungai Babon, Jawa Tengah". Desertasi. UGM. Yogyakarta.
- Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fatah, Lutfi. 2006. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Banjarbaru: Pustaka Buana
- Friedman, John. 1987. *Planning in the Public Domain, From Knowledge to Action*. New Jersey: Princeton University Press.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment the Politics of Alternative Development*. USA: Blackwell Publishers, Cambridge.
- Ghozali, Imam dan Chariri, Anis. 2007. *Teori Akuntansi, Semarang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R. 2001. "Thirty Years of Social Accounting Reporting and Auditing: What (if anything) have we learnt?" *Business Ethics: A Europea Review*." Vol. 10, No. 1, Page. 9-15.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa inovasi dan Partisipasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fasho Publishing.